

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan petunjuknya sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik 2020.

Buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik 2020 ini berisikan tentang data dan informasi kependudukan Kabupaten Gresik yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam pembangunan wilayah dan secara langsung akan mensukseskan program pembangunan nasional terutama dibidang kependudukan.

Berbagai macam informasi tentang kependudukan sangat berguna bagi berbagai pihak di dalam masyarakat. Bagi pemerintah informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

Besar harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana informasi perkembangan kependudukan yang positif dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik maupun pihak lain termasuk dunia usaha.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik Tahun 2020.

**Gresik, 2020**  
**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Gresik**

**KHUSAINI, SE. M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.19670423 199003 1 009**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	1			
<b>DAFTAR ISI</b>	3	- Piramida Penduduk	51	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	4	- Penduduk Menurut Agama	53	
<b>DAFTAR TABEL</b>	5	- Angka Pernikahan	55	
<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN GRESIK</b>	6	- Angka Perceraian	56	
<b>SISTEMATIKA PENULISAN</b>	18	<b>B. Kualitas Penduduk</b>	57	
<b>1. PENDAHULUAN</b>		- Kesehatan	57	
A. Latar Belakang	20	- Kelahiran	58	
B. Tujuan	22	- Kematian	59	
C. Ruang Lingkup	22	- Pendidikan	60	
D. Pengertian Umum Dan Istilah	23	- Angka Melek Huruf	62	
<b>2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK</b>		- Tenaga Kerja	63	
A. Letak Geografis	28	- Indeks Pembangunan Manusia	65	
B. Visi Dan Misi	30	- Sosial	66	
C. Perekonomian Daerah	32	<b>C. Mobilitas Penduduk</b>	67	
D. Potensi Daerah	35	- Migrasi Masuk	67	
<b>3. SUMBER DATA</b>	42	- Migrasi Keluar	68	
<b>4. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN</b>		<b>5. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN</b>		
A. Kuantitas Penduduk	44	- Kepemilikan Kartu Keluarga	70	
- Jumlah Penduduk	44	- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	71	
- Kepadatan Penduduk	46	- Kepemilikan Akta Kelahiran	72	
- Pertumbuhan Penduduk	48	- Kepemilikan Akta Kematian	73	
- Rasio Jenis Kelamin	50	- Kepemilikan Akta Nikah	74	
		- Kepemilikan Akta Cerai	75	
		<b>6. KESIMPULAN</b>	77	
		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	78	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	29			
Gambar 2.2	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2015-2019 berdasarkan ADHK 2010 (dalam persen)	33	Gambar 4.4	Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019	52
Gambar 2.3	Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019 (Dalam Milyar Rupiah)	34	Gambar 4.5	Grafik Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 2019	56
Gambar 4.1	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	45	Gambar 4.6	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2019	60
Gambar 4.2	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2019	49	Gambar 5.1	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP Kabupaten Gresik Tahun 2019	71
Gambar 4.3	Komposisi Penduduk Menurut	50			

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelamin Tahun 2019	44	Tabel 4.14	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019	62
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	47	Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Gresik Tahun 2019	64
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan	48	Tabel 4.16	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2010-2019	65
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kab.Gresik Tahun 2015-2019	49	Tabel 4.17	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik, 2012–2019	66
Tabel 4.5	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	50	Tabel 4.18	Jumlah Penduduk Migrasi Masuk di Kabupaten Gresik Tahun 2019	67
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2019	51	Tabel 4.19	Jumlah Penduduk Migrasi Keluar di Kabupaten Gresik Tahun 2019	68
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2019	54	Tabel 5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2019	70
Tabel 4.8	Data Peristiwa Nikah, Talak, Cerai Kabupaten Gresik Tahun 2017	55	Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan E-KTP Tahun 2019	71
Tabel 4.9	Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 2019	56	Tabel 5.3	Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Gresik Tahun 2019	72
Tabel 4.10	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2019	57	Tabel 5.4	Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Gresik Tahun 2019	73
Tabel 4.11	Jumlah Kelahiran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019	58	Tabel 5.5	Kepemilikan Akta Nikah di Kabupaten Gresik Tahun 2019	74
Tabel 4.12	Jumlah Kematian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019	59	Tabel 5.6	Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Gresik Tahun 2019	75
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2019	61			

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

## TUGAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas
- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



## **BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan identitas penduduk KIA dan KTP;
  - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - d. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kegiatan Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi identitas penduduk KIA dan KTP;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identitas penduduk KIA dan KTP; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
  - b. Menyusun rumusan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - d. Melaksanakan administrasi kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

## **BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan-urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

- (1) Kepala Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan identitas penduduk KIA dan KTP;
  - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - d. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kegiatan Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Identitas Penduduk KIA dan KTP;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi identitas penduduk KIA dan KTP;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identitas penduduk KIA dan KTP; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
  - b. Menyusun rumusan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - d. Melaksanakan administrasi kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk;
  - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pindah datang dan pendataan penduduk;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pindah datang dan pendataan penduduk; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

## **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program, kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
3. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten;
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi SIAK;
  - b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola SIAK dan teknologi informasi;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tata kelola SIAK dan teknologi informasi;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang tata kelola SIAK dan teknologi informasi;
  - e. Melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola SIAK dan teknologi informasi;
  - f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan di bidang tata kelola SIAK dan teknologi informasi;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola SIAK dan teknologi informasi; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - d. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - e. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

## **BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
6. Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi Pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

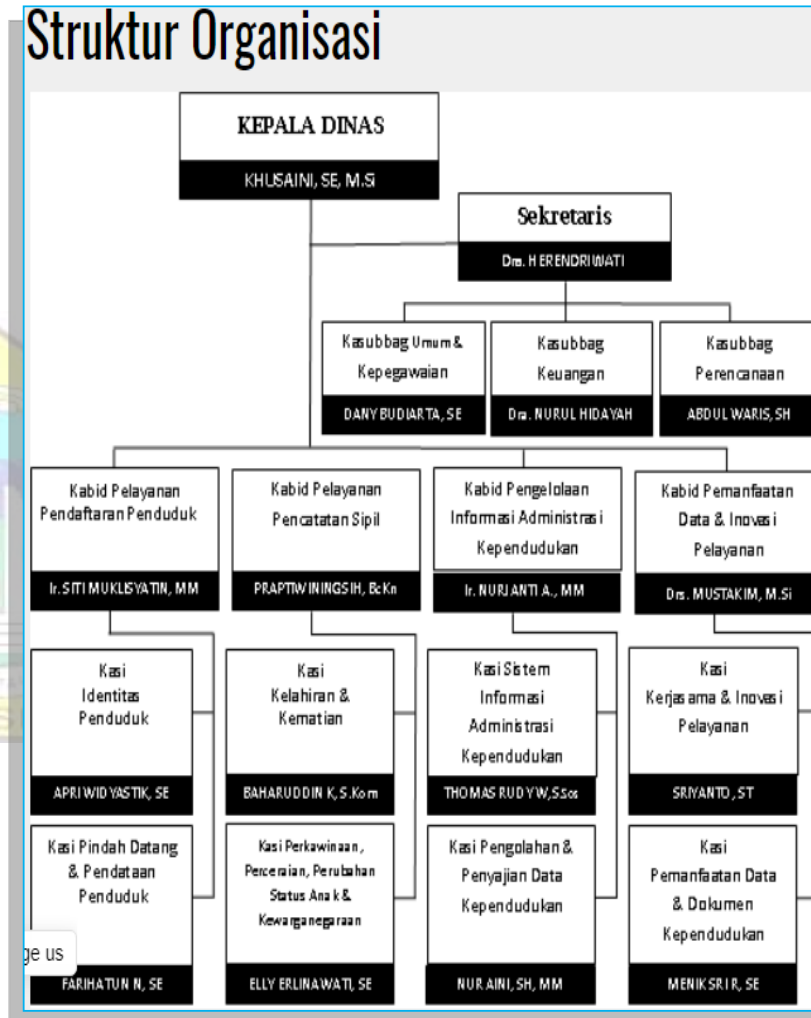
- (1) Kepala Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
  - b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - d. Melaksanakan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - e. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.



## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



## SISTEMATIKA PENULISAN

1

### PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup dan istilah yang digunakan dalam Buku Profil Kependudukan

2

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Berisikan gambaran umum Kabupaten Gresik yang berisikan letak dan kondisi geografis, visi dan misi, perekonomian dan potensi daerah.

3

### SUMBER DATA

Berisikan sumber data yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan Kabupaten Gresik

4

### PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Berisikan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan mobilitas penduduk.

5

### KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Berisikan kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk, akta nikah cerai, dan akta kelahiran dan kematian

6

### KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dari permasalahan kependudukan yang dihadapi sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

# 1

## **PENDAHULUAN**

- LATAR BELAKANG**
- TUJUAN**
- RUANG LINGKUP**
- ISTILAH KEPENDUDUKAN**

# LATAR BELAKANG

Pengembangan sistem administrasi kependudukan sangat diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 21 yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki kewajiban terkait pengelolaan Administrasi Kependudukan. Data dan informasi tentang kependudukan ini diperlukan sebagai informasi dasar (*baseline information*) untuk perencanaan pembangunan di daerah.

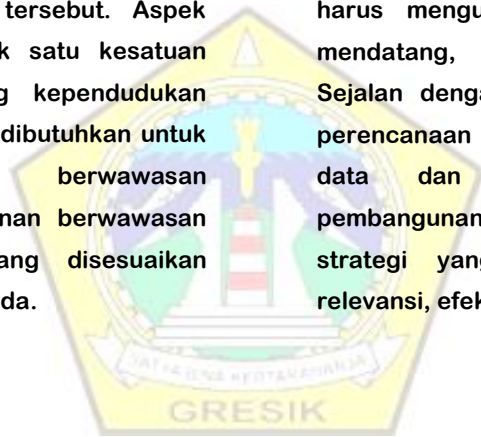
Data dapat diartikan sebagai bagian informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Oleh karena itu, data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

Data kependudukan adalah segala informasi yang terkait dengan penduduk, yang meliputi distribusi penduduk, jumlah, identitas, kelahiran, kematian, migrasi, dan lain-lain. Dapat juga didefinisikan bahwa data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi, yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain.

*Buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik Tahun 2020*



Profil kependudukan yang berisikan tentang data dan informasi kependudukan wilayah dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam pembangunan wilayah dan secara langsung akan mensukseskan program pembangunan nasional terutama dibidang kependudukan. Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah, sehingga informasi tentang kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.



Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi kebijakan dan program.



# TUJUAN

Tujuan utama Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini adalah memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai kondisi perkembangan kependudukan di Kabupaten Gresik yang berisikan data dan informasi kependudukan antara lain kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk sebagai acuan informasi untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan spesifik dalam kegiatan penyusunan Buku Profil Kependudukan ini antara lain:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap situasi kependudukan pada tingkat kabupaten dan kecamatan untuk kemudian dipergunakan sebagai penetapan kebijakan dan program.
- b. Untuk mereview dan memberikan gambaran tentang perkembangan kependudukan di Kabupaten Gresik.
- c. Memberi saran dan rekomendasi sebagai upaya dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, komitmen para perencana dan pelaku pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan.

# RUANG LINGKUP

Penyusunan profil perkembangan kependudukan di Kabupaten Gresik disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor. Data registrasi diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sedangkan data dari lintas sektor diperoleh dari sektor terkait lainnya.

Data yang dipergunakan sebagai data dasar adalah hasil pendataan awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

# ISTILAH KEPENDUDUKAN

NO.	DAFTAR ISTILAH	PENGERTIAN
1	Kependudukan	Hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, (UU Nomor 23, Tahun 2006)
2	Penduduk	Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UU Nomor 24, Tahun 2013)
3	Warga Negara Indonesia	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (UU Nomor 24, Tahun 2013)
4	Penyelenggara	Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan (UU Nomor 24, Tahun 2013)
5	Instansi Pelaksana	Perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (UU Nomor 24, Tahun 2013)
6	Administrasi Kependudukan	Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU Nomor 24, Tahun 2013)
7	Dokumen Kependudukan	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24, Tahun 2013)
8	Data Kependudukan	Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24, Tahun 2013)
9	Pendaftaran Penduduk	Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (UU Nomor 24, Tahun 2013)
10	Peristiwa Kependudukan	Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (UU Nomor 24, Tahun 2013)
11	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. (UU Nomor 24, Tahun 2013)

<b>NO.</b>	<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>PENGERTIAN</b>
12	Kartu Keluarga (KK)	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. (UU Nomor 24, Tahun 2013)
13	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (UU Nomor 24, Tahun 2013)
14	Pencatatan Sipil	Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (UU Nomor 24, Tahun 2013)
15	Pejabat Pencatatan Sipil	Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (UU Nomor 24, Tahun 2013)
16	Peristiwa Penting	Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (UU Nomor 24, Tahun 2013)
17	Izin Tinggal Terbatas	Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 24, Tahun 2013)
18	Izin Tinggal Tetap	Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (UU Nomor 24, Tahun 2013)
19	Petugas Registrasi	Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya (UU Nomor 24, Tahun 2013)
20	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. (UU Nomor 24, Tahun 2013)
21	Data Pribadi	Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (UU Nomor 24, Tahun 2013)
22	Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana	Satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana (UU Nomor 24, Tahun 2013)
23	Kuantitas Penduduk	Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal (UU Nomor 10, Tahun 1992)
24	Kualitas Penduduk	Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak (UU Nomor 10, Tahun 1992)
25	Mobilitas Penduduk	Gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (UU Nomor 10, Tahun 1992)



NO.	DAFTAR ISTILAH	PENGERTIAN
26	Profil	Grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu
27	Persebaran Penduduk	Kondisi sebaran penduduk secara keruangan (UU Nomor 10, Tahun 1992)
28	Penyebaran Penduduk	Upaya mengubah sebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung (UU Nomor 10, Tahun 1992)
29	Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas (Sirusa, BPS)
30	Data	Kumpulan dari angka-angka maupun karakter-karakter. Data dapat diolah sehingga menghasilkan informasi. (Sistem Informasi Rujukan Statistik, BPS)
31	Sumber Data	Segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau rekam kedalam berbagai bentuk media oleh instansi/lembaga (Sirusa, BPS)
32	Fertilitas	Tingkat kesuburan wanita. Yaitu peluang bisa tidaknya dan berapa banyaknya bisa mengandung dan mempunyai anak (Sirusa, BPS)
33	Kematian atau Mortalitas	Ukuran jumlah kematian (umumnya atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi (Sirusa, BPS)
34	Angka Kelahiran total	Banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu (Sirusa, BPS)
35	Ratio Jenis Kelamin	Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu (Sirusa, BPS)
36	Perkembangan Kependudukan	Segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup (UU Nomor 10, Tahun 1992)
37	Mobilitas Penduduk	Gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama (Sirusa, BPS)
38	Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)	Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik/negara (Sirusa, BPS)
39	Mobilitas penduduk non permanen	Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap ketempat lain melewati batas administratif (Sirusa, BPS)
40	Migrasi kembali	Banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda (Sirusa, BPS)
41	Migrasi seumur hidup	Migrasi berdasarkan tempat kelahiran atau bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya (Sirusa, BPS)
42	Migrasi Risen	Migrasi penduduk yang mempunyai tempat tinggal terakhir lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang (Sirusa, BPS)
43	Transmigrasi	Perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi (Sirusa, BPS)

NO.	DAFTAR ISTILAH	PENGERTIAN
44	Penduduk Usia kerja angkatan kerja	Penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun (Sirusa, BPS)
45	Angka partisipasi angkatan kerja	Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
46	Angka pengangguran	Proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja
47	Bukan angkatan kerja	Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan (Sirusa, BPS)
48	Lahir hidup	Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan (Sirusa, BPS)
49	Lahir mati	Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan (Sirusa, BPS)
50	Angka kematian bayi(IMR)	banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu (BPS, 2017)
51	Angka kematian ibu(MMR)	kematian perempuan ketika hamil atau dalam 42 hari setelah terminasi kehamilan (melahirkan/keguguran/aborsi) yang disebabkan oleh hal-hal terkait dengan kehamilan atau pemeliharannya. (BPS, 2017)
52	Angka Partisipasi Total	Proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah, yaitu 7-12, 13-15,16-18, dan 19-24 tahun
53	Angka Partisipasi Murni	Persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.
54	Angka Partisipasi Kasar	angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen (Sirusa, BPS)
55	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (Sirusa, BPS)

# 2

## **GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

-  **LETAK GEOGRAFIS**
-  **VISI DAN MISI**
-  **PEREKONOMIAN DAERAH**
-  **POTENSI DAERAH**

# LETAK GEOGRAFI

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang pantai  $\pm 140$  kilometer persegi. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara  $112^\circ$  sampai  $113^\circ$  Bujur Timur dan  $7^\circ$  sampai  $8^\circ$  Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya Sidoarjo dan Lamongan. Secara administratif Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kota Surabaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

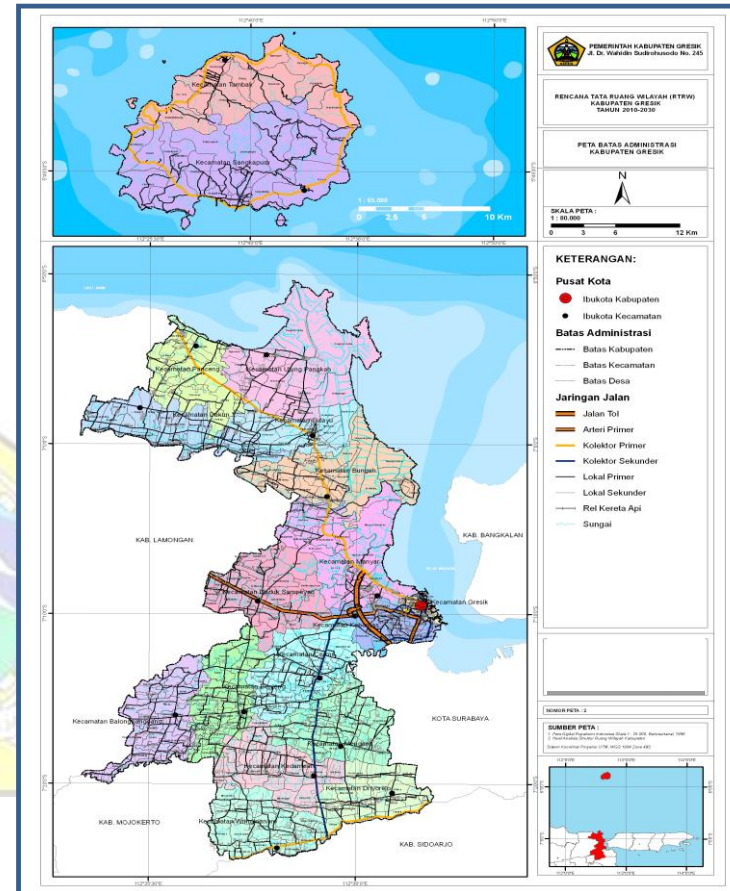




Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 Desa dan 26 kelurahan.

Kabupaten Gresik berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2-15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun.

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik**  
(Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik)

# VISI & MISI

## VISI

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Hal tersebut memerlukan suatu kerangka pemikiran upaya yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara memperbaiki kinerja sektor publik dan mengobati praktek administrasi yang tidak sehat.

Visi Kabupaten Gresik adalah Gresik yang agamis, adil, makmur dan berkehidupan yang berkualitas. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **GRESIK** adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan Kabupaten Gresik
2. **AGAMIS** adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya
3. **ADIL** adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4. **MAKMUR** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya
5. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS** adalah hidup yang sehat dengan berlatar belakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

## **MISI**

Visi yang sudah dibuat hendaknya sesuai dan selaras dengan perubahan yang akan dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaiannya. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

# PEREKONOMIAN DAERAH

Kabupaten Gresik adalah salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Kabupaten Gresik merupakan subwilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata.

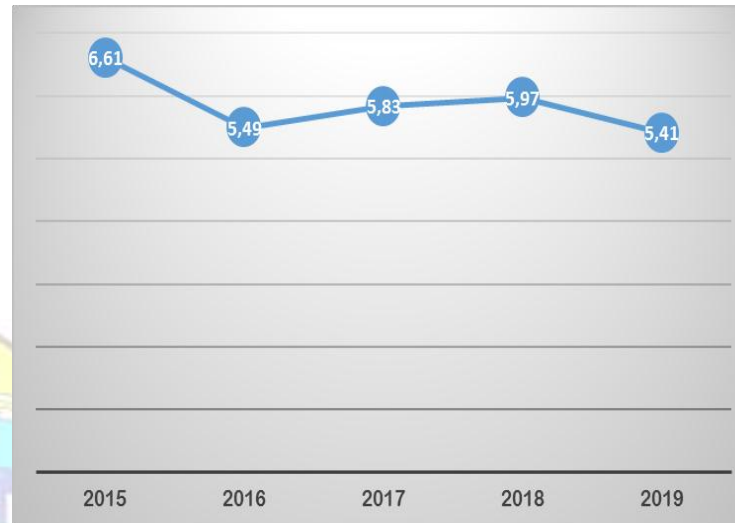
PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Gresik sebesar 101.485,3 milyar rupiah. Penyumbang PDRB terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, mengingat di Kabupaten Gresik didominasi dengan adanya kegiatan industri.

**Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019 (dalam milyar rupiah)**

No	Sektor	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	6030,0	6053,9
2	Pertambangan dan Penggalian	9895,8	9844,4
3	Industri Pengolahan	45.980,6	48.470,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	519,1	544,3
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	58,2	61,8
6	Konstruksi	9072,4	9893,3
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	12.006,7	12.814,6
8	Transportasi dan pergudangan	2089,5	2337,5
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1183,4	1281,9
10	Informasi dan Komunikasi	4304,8	4722,8
11	Jasa keuangan dan asuransi	1039,8	1084,2
12	Real estate	1263,1	1362,9
13	Jasa perusahaan	268,0	285,3
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1094,0	1136,2
15	Jasa pendidikan	822,1	891,6
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	375,9	405,5
17	Jasa lainnya	272,4	294,9
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>96.276,0</b>	<b>101.485,3</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik)

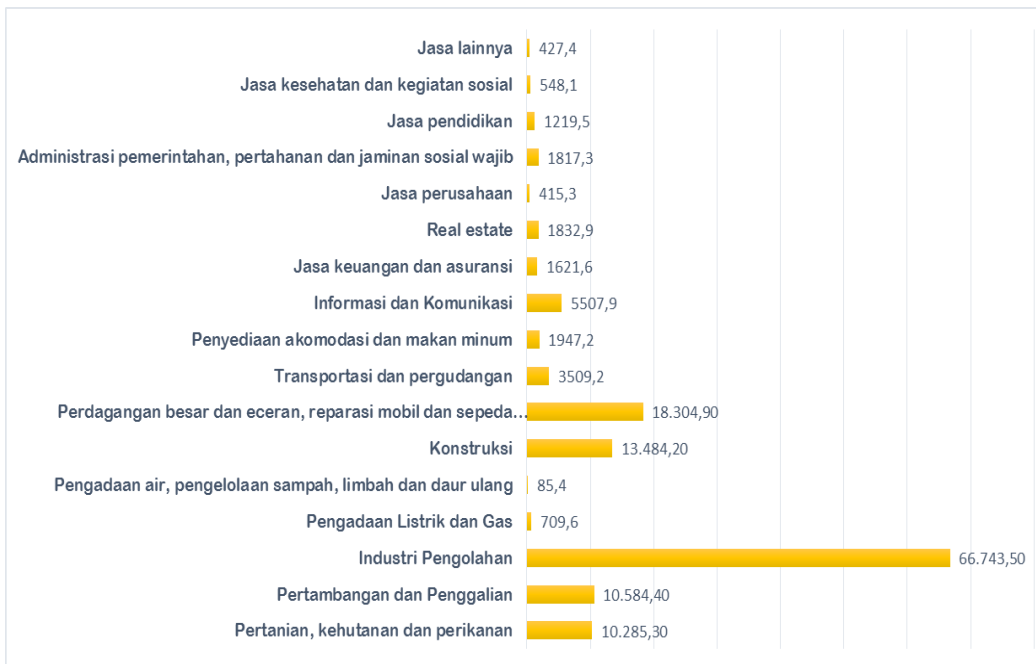




**Gambar 2.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2015-2019 berdasarkan ADHK 2010 (dalam persen)**

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik)

Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah 5,41 persen Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,56 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,41 persen.



**Gambar 2.3 Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019 (Dalam Milyar Rupiah)**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik)

Sedangkan Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Gresik tahun 2019 senilai 139.043,8 milyar rupiah. Bidang Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gresik. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Gresik mencapai 48,00 persen. Pada peringkat kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 13,16 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 7,61 persen.

# POTENSI DAERAH



Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Indonesia. Bersama dengan Sidoarjo, Gresik merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila.

Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Beberapa industri di Kabupaten Gresik antara lain Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex, Industri perkayuan/ Plywood dan Maspion. Kabupaten Gresik juga merupakan penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, maupun perikanan darat. Gresik juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 2.200 MW. Antara Gresik dan Surabaya dihubungkan oleh sebuah Jalan Tol Surabaya-Manyar, yang terhubung dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol. Selain itu perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor wiraswasta. Salah satunya yaitu Industri Songkok, Pengrajin Tas, Pengrajin Perhiasan Emas & Perak, Industri Garment (konveksi). Di utara kota Gresik juga tepatnya di kota Sedayu merupakan penghasil sarang burung walet terbesar di Indonesia.





**Produksi Buah-buahan di Kabupaten Gresik  
(Kuintal) Tahun 2019**



No.	Komoditi	Produksi
1	Mangga	379.227
2	Durian	1.273
3	Jeruk	4.830
4	Pisang	195.135
5	Pepaya	8.486
6	Rambutan	7.170
7	Belimbing	5.399
8	Nangka	5.733

# **PERTANIAN PERKEBUNAN**

**Produksi Tanaman Sayuran  
di Kabupaten Gresik (ton) Tahun 2019**

No.	Komoditi	Produksi
1	Bawang Merah	997
2	Cabai	259.947
3	Petsai	2.048
4	Tomat	11.070



**Produksi Perkebunan  
di Kabupaten Gresik (ton) Tahun 2019**

No.	Komoditi	Produksi
1	Kelapa	5.056
2	Tebu	159.134
3	Tembakau	22





### Produksi Ikan di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No.	Penangkapan ikan	Produksi
1	Penangkapan Laut	22.423
2	Budidaya Tambak Payau	62.825
3	Budidaya Tambak Tawar	68.371
4	Budidaya Perairan Umum	10.980



# PETERNAKAN PERIKANAN

### Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik, 2019

No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi
1	Ayam Buras	783.216
2	Ayam Petelur	192.656
3	Ayam Pedaging	17.162.614
4	Bebek	32.986
5	Entok	32.518

### Populasi Ternak Besar di Kabupaten Gresik, 2019

No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi
1	Sapi	57.569
2	Kerbau	234
3	Kuda	239
4	Sapi perah	530
5	Kambing	77.429
6	Domba	37.133





# INDUSTRI KERAJINAN

➤ **Sarung tenun tradisional :**

Sentra produksi terdapat di Desa Cagak Agung, Dusun Jambu Desa Semampir, Desa Kambingan, Desa Pandu, Desa Wedari Kecamatan Cerme dan Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng

➤ **Kerajinan Kulit/Imitasi :**

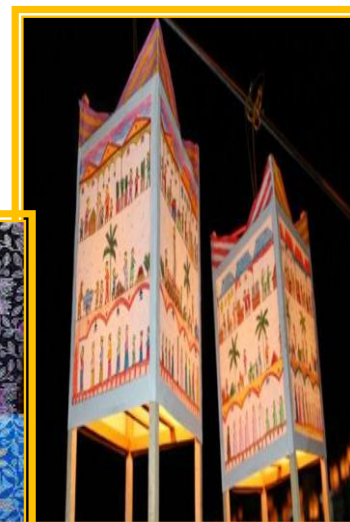
Sentra produksi terdapat di Desa Peganden Kecamatan Manyar dan Desa Banter Kecamatan Benjeng

➤ **Aneka Kerajinan Rotan Dan Pelepah Pisang :**

Sentra produksi terdapat di Desa Sumengko, Kesamben Kulon, Sooko dan Wates Tanjung Kecamatan Wringinaom.

➤ **Mebel Rotan :**

Sentra produksi terdapat di Desa Sumengko, Wates Tanjung, Pasinan Lemah Poteh, dan Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom, Desa Beton Kecamatan Menganti dan Desa Doudo Kecamatan Panceng.



# INDUSTRI KERAJINAN

- **Ukir Dan Mebel** : Sentra produksi terdapat di Desa Giri Kecamatan Kebomas, Desa Kepuh Klagen di Kecamatan Wringinanom, Desa Asem Papak di Kecamatan Sidayu dan Desa Cagak Agung di Kecamatan Cerme.



- **Songkok** : Sentra produksi terdapat di Kecamatan Gresik, Bungah dan Manyar
- **Garmen** : Sentra produksi terdapat di Desa Dukun Anyar, Padang Bandung, Kalirejo, Sembungan Kidul di Kecamatan Dukun, Desa Peganden, Kecamatan Cerme dan Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah
- **Damar Kurung** : Sentra produksi terdapat di Kelurahan Tlogo Pojok, dan Kelurahan Sukorame kecamatan Gresik



# PARIWISATA



**Bukit Jamur**  
(<https://phinemo.com>)



**Air Terjun Grojogan Candi**  
Desa Paromaan, Kecamatan Tambak



**Pantai Makam Panjang**  
Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura



**Hutan Mangrove. Pulau Mengare**  
Desa Watu Agung Kec. Bungah  
(<https://www.goodnewsfromindonesia.id>)



**Pulau Noko. Pulau Bawean Gresik**  
(<https://twitter.com/wisatagresik>)



**Makam Sunan Giri**  
Desa Giri, Kecamatan Kebomas





**3**

**SUMBER DATA**

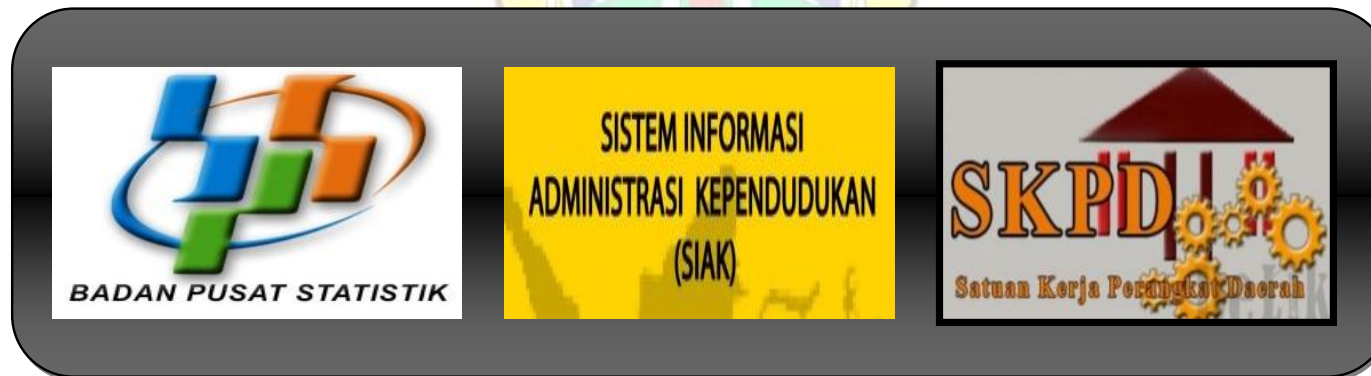
#### A. Sumber Data Utama

Sumber data utama yang digunakan dalam penulisan buku profil kependudukan ini adalah :

1. Data base kependudukan (SIAK)
2. Database KTP Elektronik




#### B. Sumber Data Penunjang

Disamping itu juga dikumpulkan data-data lain sebagai penunjang yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama dan BPS. Data yang bersumber dari SKPD lain merupakan data pelengkap khususnya untuk informasi kualitas penduduk, seperti indikator kesehatan, pendidikan dan lain-lain.



**4**

## **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

-  **KUANTITAS PENDUDUK**
-  **KUALITAS PENDUDUK**
-  **MOBILITAS PENDUDUK**

# KUANTITAS PENDUDUK

## JUMLAH PENDUDUK

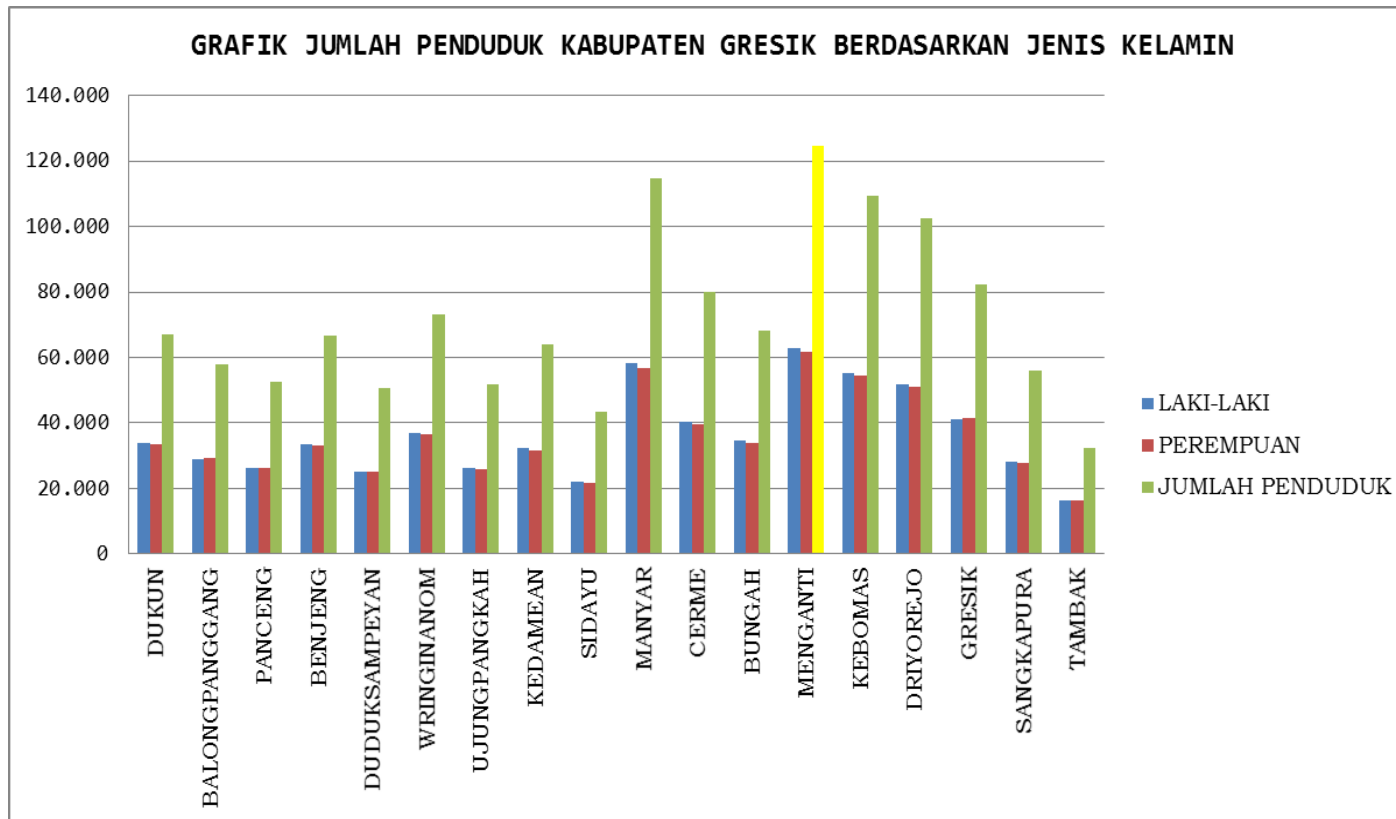
Penduduk menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional artinya penduduk menjadi pusat seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun non fisik. Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah akan menyebabkan permasalahan sosial. Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik tercatat sebesar 1.298.184 jiwa pada tahun 2019, yang terdiri dari 652.982 penduduk laki-laki dan 645.202 penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbanyak adalah Kecamatan Menganti dan diikuti oleh Kecamatan Manyar.

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui ada tidaknya gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Informasi-informasi tersebut pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tiap-tiap daerah.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelamin Tahun 2019

NO	KECAMATAN	L	P	L+P
1	DUKUN	33.759	33.368	67.127
2	BALONGPANGGANG	28.889	29.126	58.015
3	PANCENG	26.361	26.238	52.599
4	BENJENG	33.402	33.144	66.546
5	DUDUKSAMPEYAN	25.234	25.263	50.497
6	WRINGINANOM	36.957	36.340	73.297
7	UJUNGPANGKAH	26.050	25.840	51.890
8	KEDAMEAN	32.193	31.694	63.887
9	SIDAYU	21.935	21.598	43.533
10	MANYAR	58.151	56.742	114.893
11	CERME	40.265	39.767	80.032
12	BUNGAH	34.441	33.901	68.342
13	MENGANTI	62.894	61.574	124.468
14	KEBOMAS	55.052	54.340	109.392
15	DRIYOREJO	51.809	50.837	102.646
16	GRESIK	41.005	41.443	82.448
17	SANGKAPURA	28.279	27.774	56.053
18	TAMBAK	16.306	16.213	32.519
	<b>JUMLAH</b>	<b>652.982</b>	<b>645.202</b>	<b>1.298.184</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)



**Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019**

## KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap  $\text{km}^2$ . Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui ada tidaknya gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Informasi-informasi tersebut pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tiap-tiap daerah.



Rata-rata Kepadatan penduduk tahun 2019 di Kabupaten Gresik mencapai angka 1090 jiwa/  $\text{km}^2$  yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kecamatan dengan nilai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gresik yang mencapai angka 14.882 jiwa/  $\text{km}^2$ . Hal ini dikarenakan kecamatan Gresik merupakan pusat pemerintahan dan pusat kota di Kabupaten Gresik, serta tingginya arus urbanisasi dari desa ke kota. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Tambak yang nilainya hanya mencapai 413 jiwa/  $\text{km}^2$ .



**Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(km <sup>2</sup> )	(jiwa)	(jiwa/km <sup>2</sup> )
1	DUKUN	59,09	67.127	1.136
2	BALONGPANGGANG	63,88	58.015	908
3	PANCENG	62,59	52.599	840
4	BENJENG	61,26	66.546	1.086
5	DUDUKSAMPEYAN	74,29	50.497	680
6	WRINGINANOM	62,62	73.297	1.171
7	UJUNGPAKHAH	94,82	51.890	547
8	KEDAMEAN	65,95	63.887	969
9	SIDAYU	47,13	43.533	924
10	MANYAR	95,42	114.893	1.204
11	CERME	71,73	80.032	1.116
12	BUNGAH	79,44	68.342	860
13	MENGANTI	68,72	124.468	1.811
14	KEBOMAS	30,06	109.392	3.639
15	DRIYOREJO	51,29	102.646	2.001
16	GRESIK	5,54	82.448	14.882
17	SANGKAPURA	118,72	56.053	472
18	TAMBAK	78,7	32.519	413
JUMLAH		1191,25	1.298.184	1.090

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh fisiografis, keamanan, kebudayaan, biologis dan psikologis serta berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah tidak sama, hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan.



## PERTUMBUHAN PENDUDUK

**Tabel 4.3 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk 2018	Jumlah Penduduk 2019	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2019 (%)
1	DUKUN	68.480	67.127	-1,98
2	BALONGPANGGANG	59.373	58.015	-2,29
3	PANCENG	53.384	52.599	-1,47
4	BENJENG	67.821	66.546	-1,88
5	DUDUKSAMPEYAN	50.870	50.497	-0,73
6	WRINGINANOM	74.137	73.297	-1,13
7	UJUNGPAKKAH	52.150	51.890	-0,50
8	KEDAMEAN	64.230	63.887	-0,53
9	SIDAYU	44.269	43.533	-1,66
10	MANYAR	116.294	114.893	-1,20
11	CERME	80.386	80.032	-0,44
12	BUNGAH	68.904	68.342	-0,82
13	MENGANTI	126.566	124.468	-1,66
14	KEBOMAS	110.402	109.392	-0,91
15	DRIYOREJO	106.757	102.646	-3,85
16	GRESIK	83.582	82.448	-1,36
17	SANGKAPURA	69.620	56.053	-19,49
18	TAMBAK	39.146	32.519	-16,93
JUMLAH		1.336.371	1.298.184	-2,86

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk. Penduduk suatu wilayah akan bertambah apabila terdapat kelahiran dan penduduk yang datang ke wilayah tersebut, sedangkan penduduk suatu wilayah akan berkurang apabila terdapat kematian dan terdapat penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut serta validasi data kependudukan.

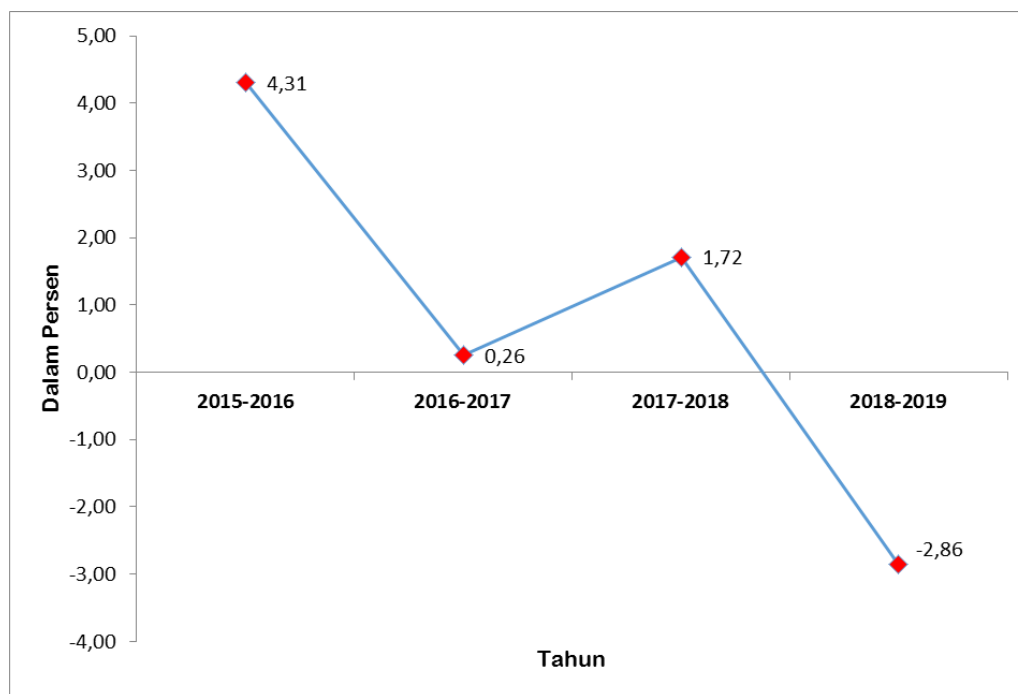
Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan yang terjadi yaitu sebesar 2,86 persen dari tahun sebelumnya atau sebanyak 38.187 penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah penduduk akibat adanya migrasi serta kematian. Tabel 4.3 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan.

Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang terletak di Pulau Bawean mengalami penurunan jumlah penduduk yang cukup drastis pada tahun 2019. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyaknya penduduk di pulau tersebut banyak yang meninggalkan daerahnya baik untuk keperluan pindah tinggal maupun pekerjaan.

**Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab.Gresik Tahun 2015-2019**

Tahun	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Jumlah Penduduk	1.310.439	1.313.826	1.336.371	1.298.184
Laju Pertumbuhan Penduduk (r)	0,043	0,003	0,017	-0,029
Pertumbuhan Penduduk (%)	4,31	0,26	1,72	-2,86

Jika nilai  $r > 0$ , artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika  $r < 0$ , artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika  $r = 0$ , artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.



**Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2019**

Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

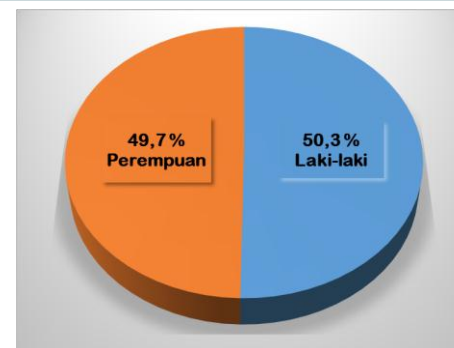
NO	KECAMATAN	L	P	L+P	Sex Ratio
1	DUKUN	33.759	33.368	67.127	101,2
2	BALONGPANGGANG	28.889	29.126	58.015	99,2
3	PANCENG	26.361	26.238	52.599	100,5
4	BENJENG	33.402	33.144	66.546	100,8
5	DUDUKSAMPEYAN	25.234	25.263	50.497	99,9
6	WRINGINANOM	36.957	36.340	73.297	101,7
7	UJUNGPANGKAH	26.050	25.840	51.890	100,8
8	KEDAMEAN	32.193	31.694	63.887	101,6
9	SIDAYU	21.935	21.598	43.533	101,6
10	MANYAR	58.151	56.742	114.893	102,5
11	CERME	40.265	39.767	80.032	101,3
12	BUNGAH	34.441	33.901	68.342	101,6
13	MENGANTI	62.894	61.574	124.468	102,1
14	KEBOMAS	55.052	54.340	109.392	101,3
15	DRIYOREJO	51.809	50.837	102.646	101,9
16	GRESIK	41.005	41.443	82.448	98,9
17	SANGKAPURA	28.279	27.774	56.053	101,8
18	TAMBAK	16.306	16.213	32.519	100,6
<b>JUMLAH</b>		<b>652.982</b>	<b>645.202</b>	<b>1.298.184</b>	<b>101,2</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK

Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gresik hampir seimbang.

Penduduk laki-laki mencapai 50,32% dari total penduduk dan sisanya sebesar 49,68 % merupakan penduduk perempuan. Sedangkan rasio jenis kelamin Kabupaten Gresik adalah sebesar 101 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.



Gambar 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

## PIRAMIDA PENDUDUK

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2019

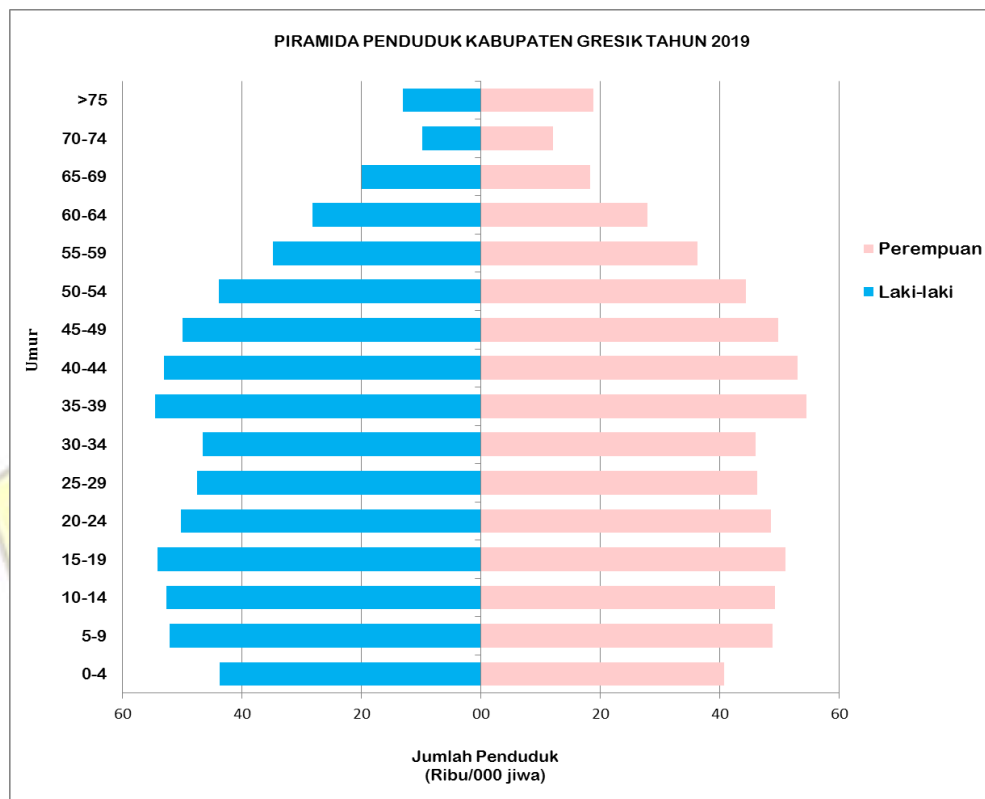
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
0-4	43.689	40.714
5-9	52.081	48.829
10-14	52.537	49.257
15-19	54.030	50.894
20-24	50.151	48.461
25-29	47.427	46.218
30-34	46.493	45.999
35-39	54.426	54.485
40-44	53.052	52.949
45-49	49.858	49.698
50-54	43.763	44.383
55-59	34.740	36.209
60-64	28.097	27.857
65-69	19.859	18.309
70-74	9.777	12.070
>75	13.002	18.870

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penggunaan piramida akan membantu memudahkan mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah menurut jenis kelamin.

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang sangat penting atau sering disebut juga struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau disebut juga umur tunggal (*single age*) dan dikelompokkan dalam lima tahunan.

Piramida penduduk Kabupaten Gresik termasuk jenis Piramida Penduduk Muda Bentuk Limas (*Expansive*). Piramida penduduk muda menyatakan bahwa sebagian besar penduduknya berada pada kelompok penduduk muda dan kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Hal ini berarti bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Kondisi ini merupakan peluang bagi Kabupaten Gresik untuk meningkatkan tujuan pembangunan daerah disebabkan oleh usia produktif yang banyak dibandingkan dengan usia non produktif.



Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019



## PENDUDUK MENURUT AGAMA



Ada beberapa agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten Gresik antara lain : agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu lainnya. Komposisi penduduk menurut agama sebagaimana terlihat pada tabel. Penduduk yang beragama Islam mendominasi sebesar 98,76% dari total keseluruhan penduduk.

Sedangkan penduduk yang beragama Kristen sebesar 0,80%, Katolik 0,22%, Hindu 0,15%, Budha 0,05%, Konghucu 0,0003% dan yang beragama lain sebesar 0,02%.

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	AGAMA						
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDDHA	KONGHUCHU	LAINNYA
1	DUKUN	67.123	3	1	0	0	0	0
2	BALONGPANGGANG	57.794	182	19	5	14	0	1
3	PANCENG	52.591	7	0	1	0	0	0
4	BENJENG	65.999	480	44	0	4	0	19
5	DUDUKSAMPEYAN	50.483	0	13	0	1	0	0
6	WRINGINANOM	72.595	580	52	38	2	0	30
7	UJUNGPAKKAH	51.889	1	0	0	0	0	0
8	KEDAMEAN	63.469	238	100	18	2	0	60
9	SIDAYU	43.531	0	2	0	0	0	0
10	MANYAR	113.629	894	251	83	35	0	1
11	CERME	79.396	495	68	19	1	0	53
12	BUNGAH	68.324	14	4	0	0	0	0
13	MENGANTI	119.917	2.291	546	1.571	86	1	56
14	KEBOMAS	107.039	1.539	609	73	123	0	9
15	DRIYOREJO	99.043	2.695	738	75	89	0	6
16	GRESIK	80.728	1.003	458	26	227	3	3
17	SANGKAPURA	56.051	1	0	0	1	0	0
18	TAMBAK	32.518	1	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1.282.119</b>	<b>10.424</b>	<b>2.905</b>	<b>1.909</b>	<b>585</b>	<b>4</b>	<b>238</b>
<b>%</b>		<b>98,76</b>	<b>0,80</b>	<b>0,22</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,0003</b>	<b>0,02</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## ANGKA PERNIKAHAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam demografi pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan dan perceraian merupakan variabel yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Perkawinan merupakan variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, antara lain melalui pendek atau panjangnya usia subur yang dilalui pasangan usia subur (PUS) yang menentukan banyaknya kelahiran.

Pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 9641 pernikahan (penduduk beragama islam, talak sebanyak 535 dan cerai sebanyak 1391).

**Tabel 4.8 Data Peristiwa Nikah, Talak, Cerai Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Nikah	Talak	Cerai
1	Wringinanom	577	34	99
2	Driyorejo	827	48	143
3	Kedamean	523	46	72
4	Menganti	961	34	99
5	Cerme	590	39	113
6	Benjeng	480	35	122
7	BalongPanggung	462	25	85
8	Duduksampeyan	334	19	51
9	Kebomas	750	33	97
10	Gresik	586	41	95
11	Manyar	822	40	106
12	Bungah	521	28	78
13	Sidayu	323	22	63
14	Dukun	549	40	94
15	Panceng	407	23	76
16	Ujungpangkah	404	24	74
17	Sangkapura	463	10	63
18	Tambak	236	11	51
Total		9815	552	1581

(Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Gresik)

## ANGKA PERCERAIAN

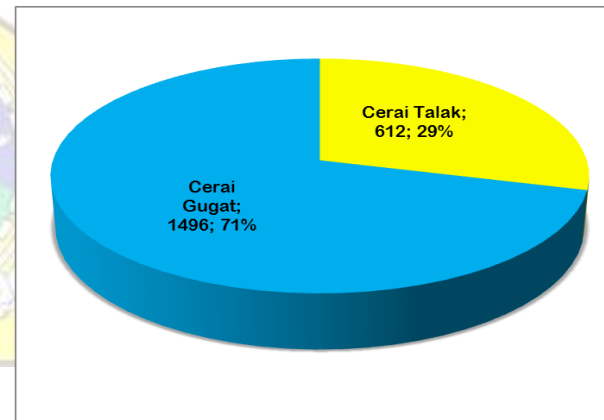
Perceraian merupakan sebuah aturan legal mengenai perpisahan antara pasangan (suami-istri). Dalam pandangan beberapa agama seperti di Indonesia, perceraian dimaknai dengan berbagai macam sudut pandang.

Demografi pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan dan perceraian merupakan variabel yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Lain halnya dengan perkawinan, perceraian justru akan mengurangi jumlah fertilitas, karena dengan adanya perceraian maka jumlah rumah tangga yang produktif berkurang dan dan tingkat hubungan suami isteri pun berkurang, sehingga tingkat fertilitas menurun.

Jumlah perkara cerai yang diterima oleh pengadilan agama Kabupaten Gresik sebesar 2418 perkara, telah diputuskan sebesar 90,07 persen. Sebagaian besar perkara perceraian di dominasi dengan kasus cerai talak dan cerai gugat.

**Tabel 4.9 Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 2019**

Perkara	Jumlah
Cerai Talak	612
Cerai Gugat	1.496



**Gambar 4.5 Grafik Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, 2019**

(Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Gresik)

# KUALITAS PENDUDUK

## KESEHATAN

Tabel 4.10 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Kecamatan	Rumah Sakit	RS Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Apotek
1	Wringinanom	0	0	2	3	4	2
2	Driyorejo	1	0	2	4	8	9
3	Kedamean	0	0	2	4	2	6
4	Menganti	2	0	2	5	6	12
5	Cerme	0	0	2	4	4	9
6	Benjeng	0	0	0	4	0	3
7	Balongpanggung	2	0	1	4	0	4
8	Duduksampeyan	1	0	1	4	2	1
9	Kebomas	1	0	3	8	8	10
10	Gresik	5	0	2	1	1	10
11	Manyar	2	1	3	6	5	8
12	Bungah	1	0	1	5	2	3
13	Sidayu	1	0	1	4	2	4
14	Dukun	1	0	2	4	2	3
15	Panceng	1	0	1	5	0	5
16	Ujungpangkah	1	0	2	2	1	2
17	Sangkapura	1	0	1	4	2	2
18	Tambak	0	0	1	3	0	1
	Gresik	20	1	29	74	49	94

(Sumber : BPS Kabupaten Gresik)

Guna menunjang layanan kesehatan masyarakat, Kabupaten Gresik memiliki beberapa rumah sakit yang memadai baik milik pemerintah maupun swasta. Rumah sakit Ibnu Sina milik pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadi rumah sakit rujukan nasional.

Jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Gresik ada 20 rumah sakit, 1 rumah sakit bersalin, 29 puskesmas, 74 puskesmas pembantu, 49 poliklinik dan 94 apotek.

## KELAHIRAN

Kelahiran merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama untuk kesejahteraan ibu dan anak.

Ada beberapa indikator kesehatan yang digunakan dalam pembangunan antara lain angka kelahiran umum. Angka Kelahiran Umum (GFR) adalah Jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15-49 atau 15-44 tahun. Jumlah kelahiran di Kabupaten Gresik tercatat sebanyak 21.828 kelahiran bayi pada tahun 2019, yang terdiri dari 11.324 bayi lahir laki-laki dan 10.504 bayi lahir perempuan.

**Tabel 4.11 Jumlah Kelahiran Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Kelahiran	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dukun	586	519
2	Balongpanggung	407	423
3	Panceng	538	441
4	Benjeng	570	491
5	Duduksampeyan	428	392
6	Wringinanom	634	532
7	Ujungpangkah	450	417
8	Kedamean	450	421
9	Sidayu	380	342
10	Manyar	1.068	1.077
11	Cerme	696	602
12	Bungah	613	585
13	Menganti	947	914
14	Kebomas	980	915
15	Driyorejo	782	751
16	Gresik	733	709
17	Sangkapura	674	634
18	Tambak	388	339
<b>Jumlah</b>		<b>11.324</b>	<b>10.504</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)



## KEMATIAN

**Tabel 4.12 Jumlah Kematian Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Kematian	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dukun	257	207
2	Balompanggung	220	185
3	Panceng	206	190
4	Benjeng	261	261
5	Duduksampeyan	143	132
6	Wringinanom	260	223
7	Ujungpangkah	184	171
8	Kedamean	166	143
9	Sidayu	178	177
10	Manyar	419	329
11	Cerme	414	442
12	Bungah	249	244
13	Menganti	393	333
14	Kebomas	442	341
15	Driyorejo	374	279
16	Gresik	480	459
17	Sangkapura	234	195
18	Tambak	114	81
<b>Jumlah</b>		<b>4.994</b>	<b>4.392</b>

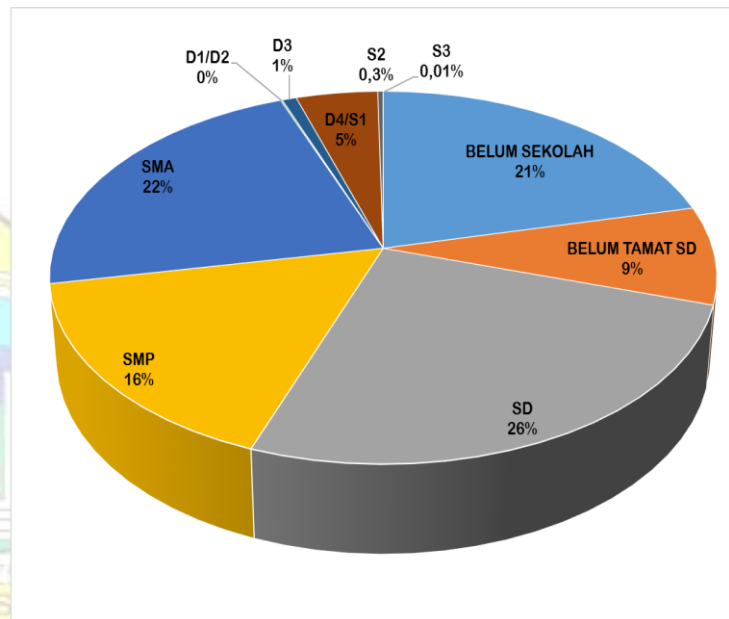
(Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik)

Kelahiran dan kematian adalah faktor alami yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas). Faktor pendukung kematian antara lain : sarana kesehatan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terjadinya berbagai bencana alam, terjadinya peperangan, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri, tindakan bunuh diri dan pembunuhan. Jumlah kematian tercatat sebanyak 9.386 kematian yang terjadi di Kabupaten Gresik selama tahun 2019.

## PENDIDIKAN

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Sebagian besar pendidikan penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 adalah setara SD yaitu sebesar 26% dari keseluruhan total penduduk, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebesar 16%, pendidikan SMA dan sederajat sebesar 22%, pendidikan D4/S1 sebesar 5%. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah S3 hanya sebesar 0,01%. Penduduk yang belum tamat SD sebesar 9 % dari total penduduk Kabupaten Gresik.

Kasus putus sekolah yang juga banyak terjadi terutama di daerah pedesaan menunjukkan bahwa pendidikan belum banyak menjadi prioritas bagi orang tua. Rendahnya prioritas tersebut antara lain dipicu oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih relatif kecil, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.



Gambar 4.6 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2019

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2019

NO	KECAMATAN	BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3
1	DUKUN	17.657	4.279	19.749	12.020	10.565	67	308	2.311	168	3
2	BALONGPANGGANG	9.637	5.090	20.577	10.827	9.929	63	278	1.544	70	0
3	PANCENG	10.322	4.858	14.270	10.304	10.388	58	240	2.063	95	1
4	BENJENG	16.723	4.629	22.805	10.903	9.462	83	354	1.472	115	0
5	DUDUKSAMPEYAN	10.618	4.324	10.796	10.110	12.177	55	375	1.947	91	4
6	WRINGINANOM	14.288	7.036	21.330	13.990	14.652	60	332	1.533	76	0
7	UJUNGPANGKAH	9.038	5.325	13.225	9.830	11.718	84	235	2.331	102	2
8	KEDAMEAN	11.858	5.565	22.419	12.507	9.897	39	275	1.250	75	2
9	SIDAYU	7.935	3.976	11.284	8.259	9.360	64	343	2.212	97	3
10	MANYAR	24.088	9.865	17.775	15.908	35.000	185	1.456	10.073	525	18
11	CERME	15.983	6.598	21.723	13.624	18.183	92	628	2.970	227	4
12	BUNGAH	14.017	5.531	16.056	12.638	16.062	73	415	3.304	242	4
13	MENGANTI	29.250	9.262	35.932	19.142	25.354	134	831	4.349	208	6
14	KEBOMAS	22.734	9.786	13.589	15.073	35.451	247	2.089	9.858	549	16
15	DRIYOREJO	23.861	8.153	22.178	15.563	27.349	193	1.052	4.064	224	9
16	GRESIK	16.318	8.128	14.675	11.455	23.937	142	1.163	6.334	293	3
17	SANGKAPURA	14.064	4.857	22.799	6.810	5.612	76	377	1.368	87	3
18	TAMBAK	8.020	3.364	12.920	4.258	3.021	24	246	636	28	2
<b>JUMLAH</b>		276.411	110.626	334.102	213.221	288.117	1.739	10.997	59.619	3272	80
<b>%</b>		<b>21,3</b>	<b>8,5</b>	<b>25,7</b>	<b>16,4</b>	<b>22,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,01</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## ANGKA MELEK HURUF

Angka melek huruf di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 bernilai mendekati sempurna pada kelompok umur 15 sampai dengan 49 tahun. Hal ini berarti bahwa semua penduduk usia 15 sampai dengan 49 tahun dapat membaca dan menulis.

**Tabel 4.14 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2019**

Kelompok Umur	2018	2019
15-19	100,00	100,00
20-29	99,88	100,00
30-39	99,82	99,82
40-49	99,22	99,65
50-59	97,43	97,93
60-69	79,68	85,66
70+	61,16	53,84

(Sumber : BPS Kabupaten Gresik)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sd.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.



## TENAGA KERJA

Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Terdapat beberapa industri di Gresik antara lain Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex, Industri perkayuan/ Plywood dan Maspion. Banyaknya industri di Kabupaten Gresik menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dari Tabel 4.13 dapat diketahui besarnya jumlah karyawan dan buruh.

Selain perekonomian di topang dari industri, Kabupaten Gresik juga termasuk kawasan andalan di bidang perikanan dan pertanian. Hal ini terlihat dari besarnya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor wiraswasta. Salah satunya yaitu Industri Songkok, Pengrajin Tas, Pengrajin Perhiasan Emas & Perak, Industri Garment (konveksi).





**Tabel 4.15 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Gresik Tahun 2019**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	291.528	30	Pembantu Rt	192	59	Wakil Walikota	0
2	Mengurus Rumah Tangga	192.090	31	Tukang Cukur	7	60	Pilot	0
3	Pelajar / Mahasiswa	226.961	32	Tukang Listrik	10	61	Akuntan	1
4	Pensiunan	2.549	33	Tukang Batu	195	62	Guru	13.450
5	PNS	11.166	34	Tukang Las/Pandai Besi	21	63	Pengacara	17
6	TNI	2.594	35	Tukang Kayu	34	64	Notaris	14
7	Polri	876	36	Tukang Sol Sepatu	1	65	Arsitek	9
8	Perdagangan	402	37	Tukang Jahit	75	66	Konsultan	8
9	Petani/ Pekebun	126.936	38	Penata Rias	11	67	Dokter	469
10	Peternak	48	39	Penata Busana	1	68	Bidan	583
11	Nelayan/ Perikanan	7.314	40	Penata Rambut	9	69	Perawat	835
12	Industri	129	41	Mekanik	91	70	Apoteker	66
13	Kontruksi	86	42	Seniman	7	71	Psikiater/ Psikolog	4
14	Transportasi	60	43	Perancang Busana	2	72	Penyiar TV	0
15	Karyawan/ Swasta	239.598	44	Penterjemah	1	73	Penyiar Radio	2
16	Karyawan BUMN	1.974	45	Pendeta	21	74	Pelaut	418
17	Karyawan BUMD	126	46	Pastor	1	75	Peneliti	4
18	Karyawan Honoror	341	47	Wartawan	26	76	Sopir	454
19	Buruh/Harian Lepas	10.226	48	Ustadz/ Mubaligh	19	77	Pialang	2
20	Buruh Tani/Perkebunan	417	49	Juru Masak	8	78	Paranormal	2
21	Buruh Nelayan/Perikanan	86	50	Promotor Acara	0	79	Pedagang	9.950
22	Buruh Peternakan	13	51	DPR-RI	0	80	Perangkat Desa	353
23	Presiden	0	52	DPD	0	81	Kepala Desa	61
24	Wakil Presiden	0	53	BPK	2	82	Biarawati	0
25	Anggota MK	0	54	DPRD Kab/Kota	7	83	Wiraswasta	148.468
26	Menteri	0	55	Dosen	693	84	Tabib	1
27	Dubes	0	56	Bupati	1	85	Paraji	0
28	Gubernur	0	57	Wakil Bupati	1	86	Imam Masjid	0
29	Wakil Gubernur	0	58	Walikota	0	87	Tukang Gigi	0
						89	Lainnya	8.099

(Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Gresik)

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator pembangunan yang berguna untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga parameter dasar.

Ketiga parameter tersebut yaitu: *Pertama*, derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*life expectancy rate*); *Kedua*, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah; *Ketiga*, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang; parameter pendidikan dengan indikator angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertakwa. Parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

**Tabel 4.16 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik, Tahun 2010- 2019**

Tahun	IPM	Komponen IPM		
		AHH (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Rp.000)
2015	73,57	72,30	8,93	11.548
2016	74,46	72,33	8,94	11.961
2017	74,84	72,36	8,95	12.375
2018	75,28	72,46	8,96	12.845
2019	76,10	72,61	9,29	13.295

(Sumber : BPS Kabupaten Gresik)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia maka akan disertai meningkatnya kualitas hidup masyarakat setempat.



## SOSIAL

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 sebesar 148.610 orang atau sekitar 11,35 % dari total penduduk. Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Garis kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar Rp. 466.154/Kapita/Bulan.

**Kedalaman Kemiskinan (P1)** adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

**Keparahan Kemiskinan (P2)** adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang berarti bahwa Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel 4.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik. 2012–2019**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	372661	170,76	13,63
2016	393447	167,12	13,19
2017	414261	164,08	12,80
2018	438704	154,02	11,89
2019	466154	148,61	11,35

Data sosial khususnya mengenai kesejahteraan rakyat (Kesra), perlu diketahui untuk mengetahui sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang secara umum dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memerlukan perhatian lebih banyak, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

# MOBILITAS PENDUDUK

Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Migrasi Masuk di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Dukun	469	404
2	Balongpanggang	478	391
3	Panceng	437	346
4	Benjeng	533	474
5	Duduksampeyan	347	328
6	Wringinanom	588	514
7	Ujungpangkah	334	283
8	Kedamean	393	365
9	Sidayu	312	288
10	Manyar	1.314	1.349
11	Cerme	875	843
12	Bungah	509	504
13	Menganti	1.263	1.283
14	Kebomas	1.411	1.437
15	Driyorejo	1.220	1.216
16	Gresik	892	937
17	Sangkapura	354	362
18	Tambak	239	231
JUMLAH		11.968	11.555

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## MIGRASI MASUK

Selain kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk berupa migrasi masuk dan migrasi keluar adalah faktor yang juga mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Migrasi masuk merupakan masuknya penduduk ke suatu daerah tujuan.

Terdapat dua faktor yang terdapat di daerah asal maupun tujuan yang selalu terkait dengan perpindahan penduduk, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Faktor positif akan menarik minat seseorang untuk melakukan migrasi masuk, antara lain : kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik; kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi; lingkungan yang menyenangkan, misalnya iklim, tempat tinggal, tersedianya sarana kesehatan, rekreasi; serta ajakan dari orang yang dijadikan sebagai tempat berlindung.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 tercatat 23.523 orang yang datang atau migrasi masuk ke Kabupaten Gresik, diantaranya 11.968 orang laki-laki dan 11.555 orang perempuan. Migrasi masuk terbesar ada di Kecamatan Kebomas sebanyak 2.848 orang.

## MIGRASI KELUAR

**Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Migrasi Keluar di Kabupaten Gresik Tahun 2019**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Dukun	341	267
2	Balongpanggang	342	300
3	Panceng	252	185
4	Benjeng	412	357
5	Duduksampeyan	322	274
6	Wringinanom	320	259
7	Ujungpangkah	214	181
8	Kedamean	238	230
9	Sidayu	292	231
10	Manyar	996	939
11	Cerme	427	448
12	Bungah	359	353
13	Menganti	705	638
14	Kebomas	948	957
15	Driyorejo	701	696
16	Gresik	941	936
17	Sangkapura	228	177
18	Tambak	143	107
<b>Jumlah</b>		<b>8.181</b>	<b>7.535</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Migrasi keluar (*out migrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari daerah asal. Adapun data migrasi keluar ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Semakin tinggi angka migrasi keluar, maka daerah tersebut daya tariknya akan semakin kecil bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai migrasi keluar antara lain : makin berkurangnya SDA; semakin menyempitnya lahan pekerjaan ditempat asal; adanya tekanan diskriminasi politik, agama dan suku, serta ketidakcocokan dengan budaya/adat istiadat setempat. Pada akhir tahun 2019 tercatat **15.716** orang bermigrasi keluar dari Kabupaten Gresik. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dari tiga tahun terakhir.



**5**

## **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

- + KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA**
- + KEPEMILIKAN KTP**
- + KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN**
- + KEPEMILIKAN AKTA NIKAH DAN PERCERAIAN**

# KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dari beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dokumen ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan Surat Keterangan dari Desa, kebutuhan data untuk pemilihan umum, sensus penduduk dan lainnya.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebanyak 356 dengan total kepala keluarga (KK) sebanyak 394.657 dan keseluruhannya telah memiliki KK, yang berarti bahwa kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Gresik sudah mencapai 100%.

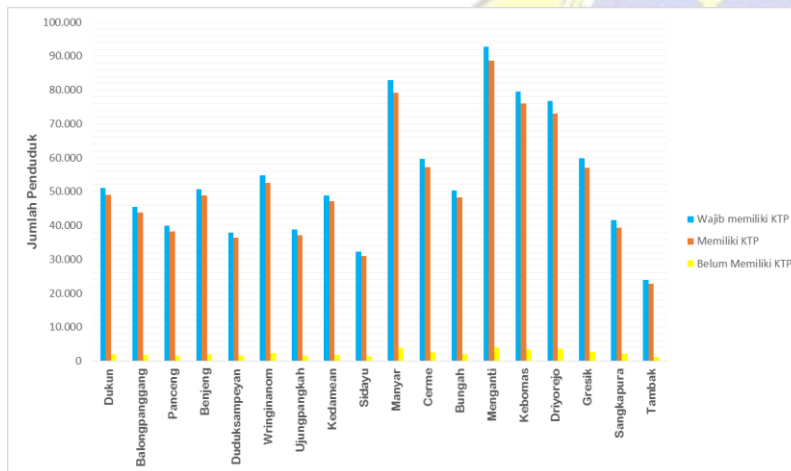
Tabel 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga
1	Dukun	26	20.186
2	Balongpanggung	25	18.358
3	Panceng	14	15.520
4	Benjeng	23	20.456
5	Duduksampeyan	23	14.840
6	Wringinanom	16	23.715
7	Ujungpangkah	13	15.392
8	Kedamean	15	20.231
9	Sidayu	21	12.393
10	Manyar	23	33.202
11	Cerme	25	23.283
12	Bungah	22	19.878
13	Menganti	22	37.789
14	Kebomas	21	32.342
15	Driyorejo	16	31.312
16	Gresik	21	25.185
17	Sangkapura	17	15.873
18	Tambak	13	9.117
	<b>Jumlah</b>	<b>356</b>	<b>389.072</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

# KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas wajib yang harus dimiliki oleh warganegara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas. Kepemilikan KTP diwajibkan oleh aturan hukum yang berlaku. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini mempunyai fungsi sebagai simbol atau kartu tanda pengenalan penduduk dari suatu negara tertentu, dimana penduduk dapat mempunyai peluang dalam penggunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.



**Gambar 5.1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP Kabupaten Gresik Tahun 2019**

**Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan E-KTP Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Memiliki KTP	Belum Memiliki KTP
1	Dukun	49121	2.000
2	Balongpanggang	43817	1.693
3	Panceng	38188	1.633
4	Benjeng	48810	1.915
5	Dudusampeyan	36399	1.555
6	Wringinanom	52541	2.262
7	Ujungpangkah	37174	1.651
8	Kedamean	47113	1.781
9	Sidayu	30976	1.343
10	Manyar	79066	3.801
11	Cerme	57225	2.474
12	Bungah	48372	1.997
13	Menganti	88677	4.058
14	Kebomas	76061	3.511
15	Driyorejo	73040	3.597
16	Gresik	57164	2.681
17	Sangkapura	39351	2.191
18	Tambak	22781	1.192
<b>Jumlah</b>		<b>925.876</b>	<b>41.335</b>
<b>%</b>		<b>96,62</b>	<b>3,38</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

# KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya.

Adapun beberapa manfaat Akta Kelahiran antara lain: Identitas Anak, Administrasi Kependudukan (KTP, KK), Keperluan Sekolah, Pendaftaran Pernikahan di KUA, pendaftaran Pekerjaan, Persyaratan Pembuatan Paspor, Pengurusan Hak Ahli Waris, Pengurusan Asuransi, Pengurusan Tunjangan Keluarga, Pengurusan Hak Dana Pensiun, melaksanakan Ibadah Haji.

Jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebanyak 647.664 dokumen, sedangkan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 650.520 dokumen. Angka tersebut merupakan kepemilikan akta kelahiran penduduk laki-laki dan perempuan yang tercetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan akhir tahun 2019.

Tabel 5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran
1	Dukun	34.170	32.957
2	Balongpanggang	27.014	31.001
3	Panceng	27.236	25.363
4	Benjeng	31.974	34.572
5	Duduksapeyan	18.641	31.856
6	Wringinanom	31.971	41.326
7	Ujungpangkah	27.255	24.635
8	Kedamean	30.615	33.272
9	Sidayu	22.977	20.556
10	Manyar	65.305	49.588
11	Cerme	45.624	34.408
12	Bungah	35.623	32.719
13	Menganti	55.356	69.112
14	Kebomas	65.106	44.286
15	Driyorejo	45.258	57.388
16	Gresik	47.994	34.454
17	Sangkapura	21.114	34.939
18	Tambak	14.431	18.088
<b>Jumlah</b>		<b>647.664</b>	<b>650.520</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

# KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Penduduk yang meninggal harus dilaporkan untuk dihapus. Karena jika tidak dilaporkan akan tetap tersimpan di daftar kependudukan. Pencatatan kematian sangat penting bagi penduduk, terutama bagi ahli waris yang ditinggalkan. Akta kematian ini sebagai bukti sah mengenai status kematian seseorang yang diperlukan sebagai dasar untuk pembagian hak waris, penetapan status janda atau duda pasangan yang ditinggalkan serta pengurusan asuransi, pensiun dan perbankan.

Jumlah kepemilikan akta kematian penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebanyak **9.702** dokumen, sedangkan penduduk yang belum memiliki akte kematian sebanyak **6.404** dokumen. Angka tersebut merupakan kepemilikan akta kematian penduduk laki-laki dan perempuan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan akhir tahun 2019.

Tabel 5.4 Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk Memiliki Akta Kematian	Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian
1	Dukun	481	310
2	Balompanggung	296	200
3	Panceng	283	125
4	Benjeng	480	242
5	Duduksapeyan	229	123
6	Wringinanom	365	116
7	Ujungpangkah	397	50
8	Kedamean	318	183
9	Sidayu	290	61
10	Manyar	764	473
11	Cerme	446	277
12	Bungah	339	157
3	Menganti	794	534
14	Kebomas	1459	1263
15	Driyorejo	765	596
16	Gresik	1709	1540
17	Sangkapura	195	114
18	Tambak	92	40
<b>JUMLAH</b>		<b>9.702</b>	<b>6.404</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)



# KEPEMILIKAN AKTA NIKAH

Tabel 5.5 Kepemilikan Akta Nikah di Kabupaten  
Gresik Tahun 2019

Buku atau akta nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kemenag RI kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adapun manfaat utama dari kepemilikan akta nikah antara lain : memberikan keabsahan atas adanya pernikahan, memudahkan birokrasi, memastikan istri bisa mendapat haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, serta memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak

Jumlah kepemilikan akta nikah penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebanyak **210.374** dokumen, sedangkan penduduk yang belum memiliki akta nikah sebanyak **447.170** dokumen.

No	Kecamatan	Penduduk Memiliki Akta Nikah	Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah
1	Dukun	10.481	23108
2	Balongpanggang	9.690	22511
3	Panceng	8.704	18021
4	Benjeng	10.207	26078
5	Duduksapeyan	8.647	17404
6	Wringinanom	12.852	27324
7	Ujungpangkah	11.838	14532
8	Kedamean	11.627	23875
9	Sidayu	6.353	15207
10	Manyar	18.822	36638
11	Cerme	12.125	29572
12	Bungah	12.222	20794
3	Menganti	17.050	47890
14	Kebomas	23.464	29999
15	Driyorejo	14.854	38128
16	Gresik	13.878	23040
17	Sangkapura	4.750	20622
18	Tambak	2.810	12427
<b>J U M L A H</b>		<b>210.374</b>	<b>447.170</b>

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

# KEPEMILIKAN AKTA CERAI

Akta perceraian adalah suatu bukti legal tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu.

Jumlah kepemilikan akta cerai penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sebanyak 11.689 dokumen, sedangkan penduduk yang belum memiliki akta nikah sebanyak 40.480 dokumen.

Tabel 5.6 Kepemilikan Akta Cerai di Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk Memiliki Akta Cerai	Penduduk Belum Memiliki Akta Cerai
1	Dukun	492	2248
2	Balongpanggang	758	1751
3	Panceng	476	1412
4	Benjeng	754	2031
5	Duduksapeyan	444	1724
6	Wringinanom	686	2684
7	Ujungpangkah	455	2267
8	Kedamean	592	1753
9	Sidayu	356	1083
10	Manyar	941	2677
11	Cerme	744	2742
12	Bungah	425	2049
3	Menganti	956	3683
14	Kebomas	1337	2564
15	Driyorejo	1065	2562
16	Gresik	958	5156
17	Sangkapura	150	1400
18	Tambak	100	694
J U M L A H		11.689	40.480

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)



**6**

**KESIMPULAN**

## KESIMPULAN

- ✦ Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seseorang perencana tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosio-ekonomi, kultur yang dianut, atau jenis kelamin saja, melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, perkembangan kelahiran, kematian, proyeksi penduduk, dan sebagainya.
- ✦ Besarnya Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru dibidang kependudukan, terutama yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Karena selain kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan dan kepadatan penduduk terutama di daerah perkotaan. Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius terutama dampaknya terhadap permasalahan lingkungan.
- ✦ Buku profil perkembangan kependudukan ini merupakan salah satu informasi dasar (*baseline information*) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Gresik khususnya yang terkait dengan bidang kependudukan. Sehingga untuk menyempurnakan keakuratan dan kelengkapan data yang dihasilkan, dibutuhkan kerjasama antar SKPD terkait terutama yang berkaitan dengan masalah kependudukan.



## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Potensi Kabupaten Gresik 2019. <http://bappeda.jatimprov.go.id>.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Profil Kependudukan Kabupaten Gresik 2019. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Profil Kependudukan Kabupaten Gresik 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik Dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Gresik

Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA). BPS Indonesia. <https://sirusa.bps.go.id>

Buku Mengkaji Ilmu Geografi 2. Sugiyanto. Danang Endart. <http://kumpulan-materi.blogspot.co.id>

Kabupaten Gresik Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.

Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial . Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Potensi daerah Pulau Bawean. <http://rusabawean.com>

Rozy Munir.1981. Dasar– dasar Demografi Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dasar-dasar Demografi. Tim Penulis Lembaga Demografi FEUI

